

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Vera Meirani Kusuma Wardani¹, Dr. M. Kendry Widiyanto, M.Si², Hasan Ismail, S.AP., M.AP³

¹²³ Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

wardanivera58@gmail.com

kenronggo@untag-sby.ac.id

hasanismail@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin di Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban ekonomi kelompok rentan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam yang memungkinkan penilaian komprehensif terhadap latar belakang kebijakan, sumber daya yang digunakan, mekanisme pelaksanaan, serta hasil dan dampak program. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, namun masih terdapat ketidaktepatan sasaran akibat validitas data kemiskinan yang belum optimal. Maka, perlukan adanya peningkatan validasi data, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan agar program dapat mencapai sasaran secara lebih tepat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, bantuan sosial, keluarga miskin, Bojonegoro, model CIPP.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the policy of providing social assistance to poor families in Bojonegoro Regency as an effort to improve community welfare and reduce the economic burden on vulnerable groups. The evaluation was conducted using the CIPP (Context, Input, Process, Product) model from Stufflebeam, which allows for a comprehensive assessment of the policy background, resources used, implementation mechanisms, and program outcomes and impacts. The research method used was a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the social assistance policy is in accordance with the needs of the poor, but there are still inaccuracies in targeting due to the suboptimal validity of poverty data. Therefore, there is a need for increased data validation, strengthened inter-agency coordination, and improved implementation mechanisms so that the program can reach its targets more accurately and sustainably.

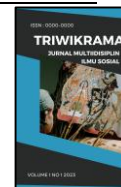
Keywords: Policy evaluation, social assistance, poor families, Bojonegoro, CIPP model.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan dalam kehidupannya. Munculnya fenomena ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah yang tidak mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi

*Corresponding author

E-mail addresses: wardanivera58@gmail.com



masyarakatnya. Pengentasan kemiskinan menjadi gagasan pokok untuk meningkatkan angka kesejahteraan hidup warga masyarakat Indonesia. Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, memiliki hutan hijau yang luas, menjadi pusat pemerintahan serta tulang punggung perekonomian dan sekaligus pusat dari Bakorwil Bojonegoro. Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat sejumlah tantangan sosial yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan dan daerah dengan tingkat akses yang terbatas.

Tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, serta ketimpangan ekonomi masih menjadi isu utama yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menargetkan angka kemiskinan turun hingga 10,37% pada tahun 2025, lalu turun lagi menjadi 8,98% pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui program bantuan sosial pembangunan atau sering disebut sebagai Program bantuan ALADIN (Atap, Lantai, Dinding) yaitu merupakan sebuah program Pemerintah Kabupaten untuk merenovasi rumah tidak layak huni (RTHL).

Program ini bertujuan untuk membantu warga memiliki rumah yang layak huni dan nyaman dengan memperbaiki bagian-bagian yang rusak atau belum layak. Pelaksanaan program ALADIN juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan manusiawi. Meskipun telah memberikan manfaat bagi banyak warga, pelaksanaan program ALADIN tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan anggaran, serta pengawasan terhadap kualitas hasil pembangunan.

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana program bantuan tersebut telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Dengan adanya evaluasi, pemerintah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dan dasar pengambilan keputusan di masa mendatang.

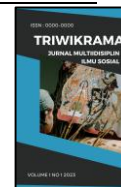
Dalam rangka mengarahkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bojonegoro, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja, maka perlu disusun dan dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) dalam lima tahun ke depan. Penyusunan rencana Strategis ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan sosial, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, keputusan, atau program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, mencakup segala hal yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,



hingga lingkungan. Menurut William N. Dunn, seorang ahli analisis kebijakan, Kebijakan publik merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas pemerintah dalam mengidentifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses ini bersifat interaktif dan dinamis, dengan setiap tahap saling mempengaruhi dan membentuk kebijakan akhir. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan lebih lanjut, apakah kebijakan perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses analisis untuk menilai kinerja suatu kebijakan, termasuk substansi, implementasi, dan dampaknya. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan adalah ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang muncul karena diterapkannya suatu kebijakan. Evaluasi menjadi jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sebagai dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif perbaikan. Dalam efektivitasnya secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan data, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi, serta integrasi program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi agar dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Model Evaluasi Kebijakan

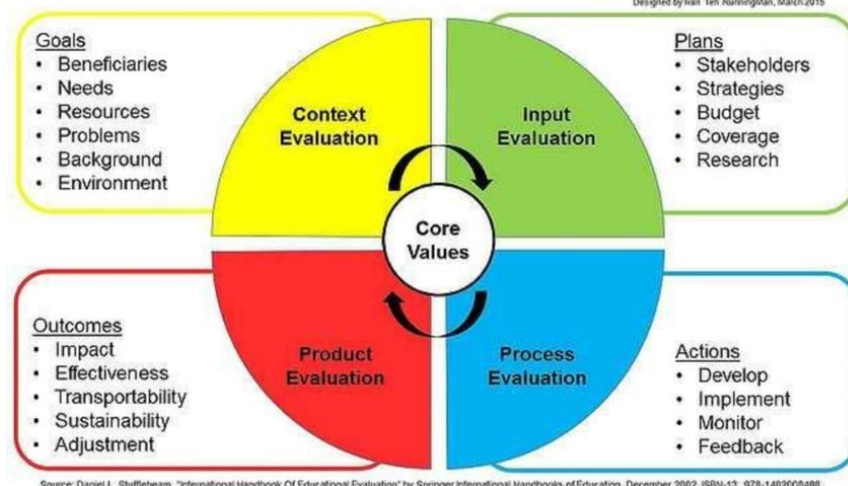
Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 197 sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif dan sistematis. Teori CIPP menilai kebijakan secara menyeluruh dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir, dan memperbaiki program secara berkelanjutan. Pada bagian komponen Context ini fokus pada analisis masalah, tujuan kebijakan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kebijakan program Aladin, evaluasi konteks ini digunakan untuk menilai tujuan yang telah ditetapkan dan membantu audiens menilai upaya dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Selanjutnya pada komponen Input membantu menentukan pendekatan program yang dapat digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Dalam hal ini, informasi evaluasi masukan merupakan sumber penting bagi pertanggungjawaban pengembang atas desain dan penganggaran upaya perbaikan. Dasarnya, evaluasi masukan harus melibatkan identifikasi dan penilaian terhadap pendekatan-pendekatan yang relevan (termasuk peralatan dan materi terkait) dan membantu para pengambil keputusan dalam mempersiapkan pendekatan yang dipilih untuk dieksekusi.

Kemudian komponen Process digunakan untuk menilai implementasi teknis kebijakan di lapangan. Melihat bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana koordinasi antarinstansi dilakukan, bagaimana pelaksana menerjemahkan aturan, serta lemahnya pengawasan. Terakhir komponen Product memastikan sejauh mana hasil evaluasi memenuhi kebutuhan semua pihak yang berhak menerima manfaat. Umpan balik mengenai hasil adalah penting baik selama siklus kegiatan maupun pada akhir kegiatan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menilai proses dan konteks yang mendasarinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan.

Gambar Model Evaluasi CIPP Daniel Stufflebeam

Context, Input, Process, Product (CIPP) Evaluation Model

Designed by Ian Teh Rummigman, March 2015



Sumber : Oleh Daniel L. stufflebeam (2017)

2. METODE

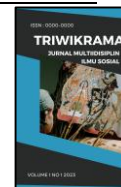
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti, khususnya terkait dengan implementasi dan evaluasi kebijakan program Aladin. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengevaluasi kebijakan publik dengan lebih mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perkataan kualitatif deskripsi untuk mengevaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bojonegoro. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan melalui wawancara kepada berbagai pihak yang berperan penting maupun terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, meliputi Dinas Sosial, Dinas Cipta Karya, Perangkat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Penerima Bantuan. Data sekunder diperoleh dari bukti, laporan, artikel jurnal, koran dan sebagainya, hasil dokumentasi yang sudah ada di tempat penelitian akan dijadikan hasil tambahan penelitian.

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan metode penunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses implementasi kebijakan, ketepatan sasaran, dampak yang dirasakan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan berlangsung di lapangan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, serta memberikan dasar hukum dan administratif yang mendukung analisis penelitian.



Analisi Data

Analisis data merupakan cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Model analisis data pola Miles dan Huberman adalah sebuah model yang digunakan dalam analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh A. Michael Huberman dan Johnny S. Miles. Model ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu: Pengumpulan Data (Data Collection) tahap ini merupakan proses pengumpulan berbagai informasi dan fakta dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi Data (Data Reduction) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari lapangan. Penyajian Data (Data Display) tahap ini merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) tahap terakhir adalah proses penafsiran makna terhadap data yang telah disajikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, termasuk penanganan keluarga miskin, pemberdayaan sosial, serta pelaksanaan program bantuan sosial. Dalam objek penelitian ini, Dinas Sosial menjadi fokus dalam menggambarkan kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, serta kualitas hasil bangunan, yang berkaitan dengan komponen Input, Process, dan Product dalam model CIPP.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Perangkat Desa/Kelurahan, serta masyarakat penerima bantuan program ALADIN (Atap, Lantai, Dinding). Dinas Cipta Karya berperan pentingnya dalam melakukan verifikasi teknis kondisi bangunan rumah tidak layak huni (RTLH), menyusun rencana teknis (RAB), jenis material, dan standar kualitas pembangunan program. Mengawasi pelaksanaan fisik pembangunan, baik melalui swakelola maupun pihak penyedia jasa, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas hasil pembangunan dan mengkoordinasikan laporan realisasi fisik dan anggaran kepada pemerintah daerah.

Perangkat desa/kelurahan memegang peran kunci sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan Program ALADIN karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat yang termasuk kriteria untuk mendapatkan bantuan ini. masyarakat penerima bantuan, objek penelitian yang paling penting karena menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Karakteristik penerima bantuan biasanya meliputi keluarga miskin yang masuk dalam DTKS atau hasil verifikasi sosial desa/kelurahan. Dalam penelitian ini, masyarakat penerima bantuan memberikan bantuan dengan memberikan informasi terkait seperti, pengalaman mereka selama proses pengajuan dan pelaksanaan program, penilaian terhadap kualitas bangunan setelah menerima bantuan, dan dampak program terhadap kesejahteraan dan keamanan tempat tinggal mereka.

Penyajian Data

Penyajian data proses mengorganisasi dan menampilkan data mentah kedalam format visual atau naratif yang terstruktur seperti tabel, grafik atau diagram, agar mudah dipahami, dianalisis, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif. Pada bagian penelitian



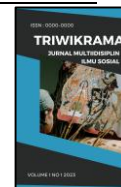
ini ditampilkan rangkaian hasil penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bojonegoro.” Pada bagian ini, data disajikan untuk menjelaskan dinamika pelaksanaan pemberian bantuan sosial, mulai dari proses verifikasi lapangan, pencairan bantuan, pemanfaatan bantuan oleh keluarga miskin, hingga hasil akhir berupa perubahan kondisi hunian atau tingkat kesejahteraan mereka. Seluruh temuan kemudian disusun berdasarkan fokus penelitian dan indikator yang merujuk pada kerangka *Context, Input, Procces, Product* (CIPP) menurut Stufflebeam. Setiap dimensi tersebut dijelaskan secara sistematis untuk menggambarkan sejauh mana program ALADIN berhasil dijalankan untuk mengurangi potensi jumlah rumah tidak layak huni dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan strategi yang dijalankan di tingkat pemerintah maupun non-pemerintah. Data yang disampaikan merupakan hasil penggalian informasi dari pihak pelaksana, penanggung jawab program, tokoh masyarakat, serta dokumen pendukung yang relevan. Seluruh hasil wawancara dan temuan lapangan yang diperoleh peneliti dirangkum dalam uraian berikut sebagai dasar untuk memahami pola pengembangan daerah yang sedang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro. Adapun hasil dari proses wawancara dan pengumpulan data oleh peneliti dapat dilihat pada uraian berikut:

Context (Konteks)

Dalam penelitian ini, dimensi konteks berfokus pada identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat miskin terkait kondisi hunian, tujuan kebijakan pemerintah daerah, serta tingkat kesesuaian program Aladin dengan kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pengumpulan data dari Dinas Sosial serta Dinas Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa masih terdapat banyak keluarga miskin yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Masalah utama yang ditemukan antara lain kerusakan pada atap, lantai, dan dinding yang membahayakan keselamatan sekaligus memengaruhi kesehatan penghuni rumah. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Bojonegoro merumuskan Program Aladin sebagai salah satu bentuk intervensi strategis untuk memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Program Aladin dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dinilai tepat sasaran karena menysasar warga dengan kondisi rumah paling memprihatinkan, dan membantu meringankan beban ekonomi mereka. Program Aladin juga dirasakan memberikan dampak positif langsung, terutama dalam menciptakan rasa aman, mengurangi risiko kerusakan rumah saat musim hujan, serta meningkatkan kenyamanan keluarga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Banyak warga yang rumahnya memprihatinkan, atapnya bocor, dindingnya sudah rapuh. Mereka tidak mampu memperbaiki sendiri karena keterbatasan ekonomi. Program ALADIN ini dijalankan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga miskin melalui perbaikan rumah.” (Wawancara dilakukan tanggal 05 desember 2025)

Pernyataan menunjukan bahwa program bantuan Aladin sangat relevan dan dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Perangkat desa menilai bahwa kondisi awal masyarakat menunjukkan adanya permasalahan perumahan yang cukup serius, sehingga program ini hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan warga. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, belum terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat, serta



hambatan teknis seperti keterlambatan material. Namun kendala tersebut tidak menghambat secara signifikan keberjalanan program. Perangkat desa berharap agar kuota bantuan dapat ditingkatkan, proses administrasi dipermudah, dan keberlanjutan program tetap dijaga untuk menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Input (Masukan)

Input merupakan dimensi yang menekankan pada bagaimana program mempersiapkan perangkat pendukung baik berupa sumber daya manusia, anggaran, pedoman teknis, maupun peralatan dan material yang diperlukan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas rumah bagi keluarga miskin. Sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan program melibatkan beberapa unsur yang memiliki peran saling melengkapi.

“Program Aladin dirancang sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. Kami memastikan bahwa material yang diberikan kepada penerima sesuai dengan spesifikasi standar minimal rumah layak huni. Besar bantuan sudah ditetapkan, tapi disesuaikan dengan kondisi rumah penerima.”

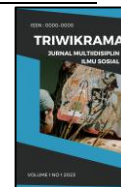
(Wawancara dilakukan tanggal 2 Desember 2025)

Berdasarkan Keterangan yang disampaikan Bapak Agus Susetyo Hardiyantoo pelaksanaan program Aladin telah berjalan dengan baik dan memiliki dasar kebijakan yang kuat untuk meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin. Program ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan struktur dasar seperti atap, lantai, dan dinding. Dari sisi pelaksanaan, bahwa setiap calon penerima bantuan melalui proses verifikasi yang ketat baik secara administrasi maupun verifikasi lapangan oleh tim teknis. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain. Selain itu, penyediaan material dan pengawasan teknis dilakukan secara bertahap dan terkontrol untuk memastikan kualitas bangunan yang dihasilkan sesuai standart. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan akses distribusi material, serta hambatan cuaca di lapangan.

Process (Proses)

Proses menekankan bagaimana kebijakan yang dirancang benar-benar dilaksanakan di lapangan. Evaluasi pada tahap ini mencakup bagaimana prosedur teknis diterapkan, bagaimana koordinasi terjadi antar aktor pelaksana, bagaimana aturan dan pedoman diterjemahkan dalam kegiatan nyata, serta berbagai kendala yang muncul terutama terkait lemahnya pengawasan. Koordinasi antarinstansi menjadi aspek penting dalam tahap proses program Aladin. Selama ini koordinasi dinilai sudah berjalan cukup baik dalam hal pengumpulan data awal dan penetapan penerima bantuan. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa koordinasi mengenai penyaluran material, laporan progres pembangunan, serta monitoring akhir masih belum optimal.

Koordinasi anatar aktor sebenarnya berjalan baik, namun terkadang ada keterlambatan informasi, terutama mengenai jadwal verifikasi dari dinas



teknis, sehingga proses di desa menjadi terhambat. Pengawasan selama pembangunan juga terkadang masih lemah karena keterbatasan waktu dan sumber daya

Hasil dari pernyataan yang disampaikan bahwa proses pelaksanaan Program Aladin pada tingkat desa telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas program. Koordinasi antara desa dan dinas terkait pada prinsipnya berjalan, tetapi terkadang mengalami keterlambatan informasi yang membuat alur pelaksanaan di tingkat desa tidak selalu mulus. Dalam tahap pembangunan, perangkat desa turut melakukan pemantauan dan mendorong partisipasi masyarakat, meskipun keterbatasan kapasitas teknis membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan beberapa pengerjaan rumah tidak sepenuhnya terpantau secara mendetail.

Product (Hasil Program)

Pada komponen Hasil berfungsi untuk menilai sejauh mana program memberikan dampak nyata, manfaat, serta perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi pada tahap ini menggambarkan apakah program Aladin benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dasar penerima bantuan dan sejauh mana perbaikan fisik rumah meningkat setelah program dijalankan.

“Kalau harus memperbaiki rumah sendiri, biayanya terlalu besar dan kami tidak sanggup. Walaupun ada beberapa bagian yang harus kami tambah sendiri seperti biaya untuk makan dan jamuan yang diberikan kepada pekerja, tapi tetap saja bantuan ini sangat membantu bagi keluarga saya. Saya sangat bersyukur dan puas dengan program Aladin.” (wawancara dilakukan tanggal 07 Desember 2025)

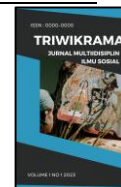
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan program Aladin memberikan dampak yang sangat positif dan nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Penerima bantuan merasakan langsung manfaat program baik dari aspek fisik maupun nonfisik. Penerima menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi dan berharap program ini terus dilanjutkan untuk membantu keluarga lain yang masih hidup dalam kondisi rumah tidak layak.

PEMBAHASAN

Context (Konteks)

Analisis konteks pada model evaluasi CIPP digunakan untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan relevansi program terhadap kondisi masyarakat. Dalam penelitian ini, konteks program Aladin dianalisis melalui empat aspek utama: latar belakang masalah, tujuan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian lingkungan kebijakan. Program Aladin lahir dari kondisi empiris bahwa masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) dalam jumlah besar di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan penelusuran lapangan serta keterangan dari perangkat desa, banyak rumah warga miskin yang mengalami kerusakan struktural seperti atap bocor, dinding rapuh, lantai masih berupa tanah, serta kurangnya fasilitas sanitasi.

Dari perspektif lingkungan kebijakan, pelaksanaan program sebenarnya didukung oleh perangkat desa, kecamatan, dan OPD teknis seperti Dinas Sosial dan Dinas Cipta Karya. Akan



tetapi, lingkungan pelaksanaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping teknis, serta tidak meratanya kapasitas aparatur desa dalam memahami prosedur program. Kendala ini berpotensi menghambat efektivitas program dan menyebabkan adanya perbedaan kualitas pelaksanaan antar desa.

Dengan demikian, dari aspek konteks dapat disimpulkan bahwa kebijakan Program Aladin memiliki urgensi tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin, namun masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek pendataan dan kesiapan lingkungan pelaksana.

Input (Masukan)

Komponen input pada model CIPP mencakup berbagai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, termasuk anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dokumen pendukung seperti SOP dan pedoman pelaksanaan. Dilihat dari aspek sumber daya manusia, program Aladin dijalankan oleh kombinasi personel dari Dinas Sosial, Dinas Cipta Karya, perangkat desa, dan tenaga pendamping teknis. Petugas dari Dinas Sosial bertanggung jawab dalam proses verifikasi administrasi, sementara petugas dari Dinas Cipta Karya mengawasi aspek teknis bangunan. Perangkat desa berperan besar dalam melakukan pendataan awal dan mengusulkan nama calon penerima bantuan. Meskipun SOP sudah tersedia secara formal, tingkat pemahaman pelaksana di lapangan belum seragam. Beberapa perangkat desa mengaku belum menerima sosialisasi yang memadai sehingga mereka hanya menjalankan program berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.

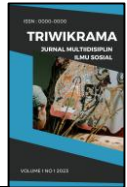
Process (Proses)

Analisis proses dalam model CIPP berfokus pada bagaimana program dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah direncanakan. Komponen ini menjadi sangat penting karena pelaksanaan yang tidak tepat dapat menghambat tercapainya tujuan program. Tahap pertama dalam pelaksanaan program adalah pendataan calon penerima bantuan yang dilakukan oleh perangkat desa melalui mekanisme pengajuan dan observasi lapangan. Data yang dihimpun kemudian diajukan ke Dinas Sosial untuk proses verifikasi administrasi. Namun dalam praktiknya, proses pendataan masih belum berjalan sesuai standar. Penelitian menemukan bahwa pendataan masih dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga peluang terjadinya bias cukup besar.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penerima mampu menyelesaikan pembangunan tepat waktu, namun beberapa mengalami hambatan berupa keterlambatan material, kurangnya tenaga kerja, serta keterbatasan dana tambahan. Kualitas pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat sekitar, terutama dalam sistem gotong royong. Hal ini menyebabkan beberapa hasil pembangunan tidak memenuhi standar konstruksi yang diharapkan. Secara umum, proses pelaksanaan program Aladin sudah berjalan namun belum optimal karena masih terdapat hambatan pada pendataan, verifikasi, transparansi penetapan, dan pengawasan teknis.

Product (Hasil Program)

Komponen produk mengevaluasi sejauh mana program Aladin berhasil mencapai hasil yang diharapkan, baik dalam bentuk output, manfaat, maupun dampak jangka panjang bagi masyarakat penerima. Dari segi output, program Aladin telah berhasil memperbaiki sejumlah



rumah tidak layak huni di berbagai desa. Penerima bantuan mengaku bahwa kondisi rumah mereka jauh lebih layak dan aman dibandingkan sebelum menerima bantuan. Dari segi outcome atau manfaat langsung, warga merasa sangat terbantu secara ekonomi karena tidak perlu menanggung biaya penuh perbaikan rumah.

Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian tetapi juga meningkatkan kesehatan lingkungan keluarga karena perbaikan sanitasi dan ventilasi yang lebih baik. Selain itu, penerapan skema swadaya dan gotong royong memberikan dampak sosial berupa meningkatnya solidaritas antarwarga di lingkungan tempat tinggal penerima.

“Kalau harus memperbaiki rumah sendiri, biayanya terlalu besar dan kami tidak sanggup. Walaupun ada beberapa bagian yang harus kami tambah sendiri seperti biaya untuk makan dan jamuan yang diberikan kepada pekerja, tapi tetap saja bantuan ini sangat membantu bagi keluarga saya. Saya sangat bersyukur dan puas dengan program Aladin.”

Secara keseluruhan, produk program menunjukkan bahwa kebijakan Aladin memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, namun masih perlu ditingkatkan dari aspek jangkauan, nilai bantuan, dan kualitas pendampingan teknis.

4. SIMPULAN DAN SARAN

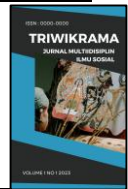
Simpulan

Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin melalui Program Aladin (Atap, Lantai, Dinding) menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), dapat disimpulkan bahwa program Aladin telah dirumuskan dengan dasar permasalahan yang jelas, yaitu keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih tinggi di Kabupaten/Kota tempat penelitian. Program ini sejalan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta prioritas pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sumber daya manusia dari Dinas Sosial, Dinas Cipta Karya, serta pemerintah kelurahan/desa telah menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung terlaksananya program. Pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, verifikasi teknis, penetapan penerima, pencairan material, hingga monitoring berjalan sesuai alur yang ditetapkan. Program Aladin memberikan hasil positif berupa meningkatnya kualitas hunian keluarga miskin. Sebagian besar penerima bantuan menyatakan puas dan merasa terbantu karena rumah menjadi lebih layak, sehat, dan aman. Namun terdapat beberapa hasil yang belum maksimal yaitu, beberapa rumah tidak seluruhnya selesai 100% karena keterbatasan swadaya. Hasil penelitian memperkuat teori bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kecocokan konteks, ketersediaan input, kelancaran proses, dan efektivitas hasil.

Saran

- Memperbaiki sistem pendataan awal penerima bantuan melalui survei langsung yang lebih ketat dan validasi berlapis.
- Meningkatkan kualitas verifikasi teknis dan pendampingan selama proses rehabilitasi, menyusun standar teknis yang lebih rinci terkait kualitas material dan desain rumah dan menambah frekuensi monitoring lapangan.
- Mengoptimalkan peran perangkat desa dalam identifikasi awal dan pengawasan progres pembangunan dan melakukan pendataan berbasis RT/RW untuk meminimalkan kesalahan sasaran.
- Menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan melaporkan jika ada kendala dalam proses rehabilitasi dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pemeliharaan rumah pasca rehabilitasi.

5. DAFTAR PUSTAKA



Alba Amru; Kurniawan Rudi. (2019). *MERAH. kebijakan pemberian bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*, 1-3.

Kasiami, S. (2019). *EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI BOJONEGORO*.

Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan, U., & Lidah Wetan, J. (n.d.). *EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL WILLIAM DUNN* Daryati Dewi Nur Nadila. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 2023.
<https://doi.org/10.56959>

Nurhayatul Janah. (2016). *EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2*.

Putri, Anisya, A., & Anisya, P. A. (2024). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*, 3(1), 94-100.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1,2275>